

ABSTRAK
PENGARUH LABELISASI HALAL TERHADAP USAHA ROTI TAWAR
DI KEC. BAGAN SINEMBAH KAB. ROKAN HILIR DI TINJAU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:

HAJJAH RODIAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya produk Roti Tawar yang tidak mencantumkan label halal. Kondisi ini dianggap sebagai masalah kecil oleh sebagian pengusaha roti, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut bukanlah hal penting yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk Roti Tawar. Produk Roti Tawar dilakukan secara tersembunyi dan jauh dari pantauan masyarakat, sehingga tingkat higienitas makanan kurang terpantau dengan baik. Adanya beberapa Pengusaha Roti Tawar yang Non Muslim menyebabkan produk Roti Tawar tersebut sangat dikhawatirkan kehalalannya. Rendahnya tingkat kesadaran para Pengusaha Roti Tawar yang enggan melakukan pendaftaran ke BP POM dan berbisnis dengan cara jujur dengan tidak mencampurkan bahan-bahan tertentu yang tidak halal menyebabkan banyaknya produk roti tawar yang beredar luas di pasaran yang perlu dikhawatirkan kehalalannya.

Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Subjek dalam penelitian ini adalah Pengusaha Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Objeknya adalah proses labelisasi halal terhadap usaha Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Adapun populasinya adalah sebanyak 8 Pengusaha Roti Tawar. Karena jumlah populasi terbatas maka penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling. Sumber data yang digunakan : 1. Data Primer yaitu sumber data diperoleh dari Pengusaha Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 2. Data Sekunder yaitu sumber data yang berasal dari buku-buku dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu: 1. Observasi adalah mengamati secara langsung kondisi usaha Roti Tawar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 2. Wawancara yang dilakukan langsung pada Pengusaha Roti Tawar.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui proses labelisasi kehalalan produk Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 2. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap produk Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisa Kualitatif Kuantitatif. Analisis Kualitatifnya itu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan oleh data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran gambaran yang

sudah ada. Sedangkan Analisis Kuantitatif adalah dituangkan untuk menerangkan dan lebih menjelaskan data-data yang berupa angka-angka atau perbandingan dari beberapa gambar sehingga akan diperoleh gambaran baru dan dijelaskan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat.

Dari penelitian yang Penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Proses labelisasi kehalalan harus dilakukan melalui prosedur permohonan dan pemeriksaan yang diajukan Produsen ke Departemen Agama, selanjutnya Departemen Agama akan menunjuk BPPOM MUI untuk melakukan Pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektur, lalu selanjutnya diadakan rapat Fatwa MUI. Jika hasil sidang Fatwa MUI memutuskan produk tersebut tidak halal, maka dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilakukan pengkaji dan disempurnakan. Dan jika produknya diterima maka produk Roti Tawar tersebut mendapat sertifikat kehalalan.

Pandangan Islam tentang perlunya berusaha dengan cara yang halal dan menggunakan labelisasi halal terhadap produk yang akan dijual kepada pembeli memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan penjualan dan peningkatan ekonomi masyarakat muslim.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **"PENGARUH LABELISASI HALAL TERHADAP PENJUALAN PADA USAHA ROTI TAWAR DI KEC. BAGAN SINEMBAH KAB. ROKAN HILIR DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM"**, pembuatan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian Oral Comprehensive sarjana lengkap pada program S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, begitu besarnya pengorbananmu serta luasnya cinta, kasih dan sayangmu, ucapan terima kasih pun rasanya tidak layak kuberikan kepadamu untuk semua pengorbananmu yang tidak lagi dapat terlukiskan. Mungkin hanya lantunan Doa yang mampu Ananda persembahkan.
2. Bapak Prof. Dr. Nazir Karim, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sekaligus pembimbing skripsi beserta wakil Dekan.
4. Bapak Mawardi, S.Ag. M.Sis selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Darmawan Tia Indrajaaya, MA selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Hj. Nurhasanah MA selaku Penasehat Akademis.
6. Bapak dan Ibu Dosen selaku staff pengajar serta Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum serta pustaka Wilayah Riau “Soeman H.S.
8. Bapak pengusaha roti tawar yang telah sudi bekerjasama dalam penulisan skripsi ini.
9. Adik-adikku tersa yang, Mushap Ashabul Maimana, Ummu Khois, Ifnu Mubarak, Siti Fatimah, Tabrani Hasan, dan sidedek kecil Hafizah Quraini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Ipit, Idhat, Nurul, Delsi, Khamsiah, Desi, Husein, Dian, dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih karena kalian selalu memberikan dorongan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Temen-temen satu kostku, Siti, Huzna Dewi, dan Widya. Terima kasih karena kalian selalu memberikan dorongan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal saleh. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan pahala yang berlipat ganda kepada kalian semua. Aamiin Yaa Rabb.....

Pekanbaru, April 2013

HAJJAH RODIAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTARTABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumisan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah usaha roti di kecamatan bagan Sinembah kecamatan rokan hilir.....	14
B. Perkembangan usaha roti tawar di kecamatan Bagan sinembah kabupaten rokan hilir	15
BAB III : KELIAN KEPUSTAKAAN TENTANG PROSES LABELISASI HALAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENJUALAN ROTI TAWAR	
A. Pengertian Labelisasi	17
B. Pengertian Halal	20
C. Teori Penjualan Terhadap Ekonomi Islam.....	26

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Proses Labelisasi Halal	34
B. Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Pengelolaan	38
C. Usaha Roti Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga ...	45

BAB V : KESIMPULAN

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunitas Muslim di seluruh dunia telah membentuk segmen pasar yang potensial dikarenakan pola khusus mereka dalam mengkonsumsi suatu produk. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan Syariat. Dalam ajaran Syariat, tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran Syariat Islam.

Ajaran tegas Syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan membuat konsumen Muslim bukanlah konsumen yang *permissive* dalam pola konsumsinya. Mereka dibatasi oleh ke-Halalan dan ke-Haraman yang dimuat dalam nash Al Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi panduan utama bagi mereka.¹

Di dalam Al-qur'an Surat Al- Ma'idah ayat 88 dijelaskan dengan bahwa :

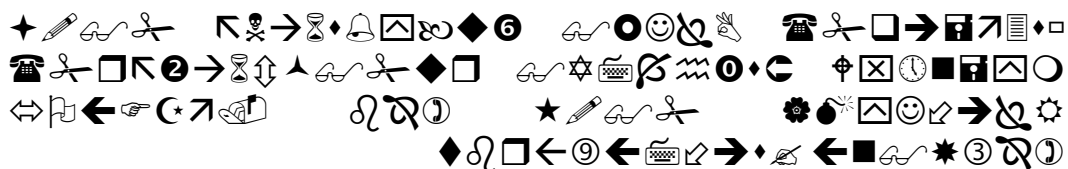


Artinya : *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Q.S. Al- Ma'idah ayat 88).*

¹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : UNRI Pres, 2007), hlm. 36

Di dalam Al-qur'an Surat An-Nahl ayat 114, Allah SWT juga menjelaskan

bahwa :



Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan

Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah (Q.S. An-Nahl : 114).

Populasi yang demikian besar dari kaum Muslimin membuat kaum Muslimin menjadi pasar yang demikian potensial untuk dimasuki. Untuk Negara sekelas Amerika Serikat yang mayoritas jumlah kaum Muslimin disana adalah minoritas, namun diperkirakan ada sekitar empat sampai sembilan juta orang yang memeluk agama Islam.²

Untuk Indonesia sendiri, dengan populasi kaum Muslimin yang mencapai bilangan 90 % dari jumlah total warga Negaranya, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen Muslim yang demikian besar. Pemahaman yang semakin baik tentang agama makin membuat konsumen Muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi.

Khusus di Indonesia, konsumen Muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk meng-audit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

² <http://www.komunitas-muslim-di-amerika>, 10 Januari 2012.

Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya.³ Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.

Produk-produk yang mendapat pertimbangan utama dalam proses pemilihannya berdasarkan ketentuan Syariat yang menjadi tolak ukur untuk konsumen Muslim adalah produk-produk makanan dan minuman. Ketidakinginan masyarakat Muslim untuk mengonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pemilihan produk (*high involvement*). Dengan begitu akan ada produk yang dapat dipilih untuk dikonsumsi dan produk yang disisihkan akibat adanya proses pemilihan tersebut.⁴

Proses pemilihannya sendiri akan menjadikan kehalalan sebagai parameter utamanya. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk makanan untuk memasuki pasar umat Muslim. Konsumen Muslim sendiri juga bukan tanpa kesulitan untuk memilah produk-produk yang mereka konsumsi menjadi produk dalam kategori halal dan haram. Tentunya untuk memeriksakan sendiri kondisi kehalalan suatu produk adalah kurang memungkinkan. Hal ini berkaitan dengan

³ M. Zaidin Abdal, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung : Angkasa, 2003), hlm. 38.

⁴ M. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Suska Pres, 2005), hlm. 19.

masalah teknis dalam memeriksa kehalalan suatu produk, seperti uji kimia, pengamatan proses serta pemeriksaan kandungan produk.⁵

Adanya LPPOM-MUI diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk. Dengan mendaftarkan produk untuk diaudit keabsahan halal-nya oleh LPPOM-MUI sehingga produknya bisa mencantumkan label halal dan hal itu berarti produk tersebut telah halal untuk dikonsumsi ummat Muslim. Hal ini berarti peluang pasar yang sangat besar dapat terbuka.⁶ Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya.

Secara teori maka, untuk para pemeluk agama Islam yang taat, pilihan produk makanan yang mereka pilih adalah makanan halal yang diwakili dengan label halal.⁷

Apalagi ditengah pesatnya perkembangan era globalisasi saat ini, dimana ada segudang cara yang dapat dilakukan oleh para produsen makanan ringan cepat saji yang dibuat dari berbagai bahan baku yang tidak sesuai dengan aturan dan kadar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, sehingga informasi yang dapat diperoleh konsumen akan semakin banyak dan turut pula mempengaruhi pola konsumsi mereka.

⁵ M. Zaidin Abdal. *Op. Cit*, , hlm. 39.

⁶ M. Djakfar, *Proses Labelisasi Produk Halal*, (Jakarta : Kencana Media Grup, 2009), hlm. 217.

⁷ Yunita, Anggraini, *Dampak Merek Asing Pada Persepsi dan Sikap Konsumen Terhadap Produk*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2002), hlm. 60.

Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal dan nutrisi-nutrisi yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut boleh dikonsumsi.

Dengan demikian produk-produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya dianggap belum mendapat persetujuan lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk diklasifikasikan ke dalam daftar produk halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya. Ketidakhadiran label itu akan membuat konsumen Muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal tersebut.

Label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar di Indonesia adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran. Peraturan pelabelan yang dikeluarkan Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Departemen Kesehatan Republik Indonesia, mewajibkan para produsen-produsen produk makanan untuk mencantumkan label tambahan yang memuat informasi tentang kandungan (*ingredient*) dari produk makanan tersebut.⁸

Dengan begitu konsumen dapat memperoleh sedikit informasi yang dapat membantu mereka untuk menentukan sendiri kehalalan suatu produk. Kondisi masyarakat Muslim yang menjadi konsumen dari produk-produk makanan yang beredar dipasar, namun mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka konsumsi selama ini.

⁸ Yaqub, *Metode Penetapan Halal*, (Jakarta : Departemen Kesehatan, 2009), hlm. 261.

Sebagai orang Islam yang memiliki aturan yang sangat jelas tentang halal dan haram, seharusnya konsumen Muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya (syubhat). LPOM-MUI memberikan sertifikasi halal pada produk-produk yang lolos audit sehingga produk tersebut dapat dipasang label halal pada kemasannya dengan demikian masyarakat dapat mengkonsumsi produk tersebut dengan aman.

Salah satu produk makanan siap saji yang saat ini banyak beredar di kalangan masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir adalah produk Roti Tawar. Saat ini banyak bermunculan *Home Industri* yang bergerak dalam bidang produksi Roti Tawar. Bahkan saat ini terdapat lebih dari 8 *Home Industri* yang bergerak dalam bidang pengolahan Roti Tawar, namun hanya sebagian kecil produsen rumahan ini yang menggunakan labelisasi halal dan mendaftarkannya di BP-POM Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil pantauan yang penulis lakukan di beberapa *Home Industri* yang bergerak dalam bidang pengolahan Roti Tawar ini, ada beberapa permasalahan yang penulis temukan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya Produk Roti Tawar yang tidak disertakan label halal. Kondisi ini dianggap sebagai masalah kecil oleh sebagian pengusaha, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut bukanlah hal penting yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk Roti Tawar.
2. Produksi Roti Tawar dilakukan secara tersembunyi dan jauh dari pantauan masyarakat, sehingga tingkat ke higienisan makanan kurang

terpantau dengan baik. Kondisi ini menyebabkan banyak makanan yang berada dalam kategori tidak baik untuk kesehatan.

3. Adanya beberapa pengusaha Roti Tawar yang non muslim menyebabkan produk Roti Tawar tersebut sangat dikhawatirkan kehalalannya. Sehingga masyarakat harus ekstra waspada dalam memilih pembelian Produk Roti Tawar.
4. Rendahnya tingkat kesadaran para pengusaha Roti Tawar yang enggan melakukan pendaftaran ke BP POM dan berbisnis dengan cara jujur dengan tidak mencampurkan bahan-bahan tertentu yang tidak halal menyebabkan banyaknya Produk Roti Tawar yang beredar luas di pasaran yang perlu dikhawatirkan ke halalannya.

Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dipahami bahwa akan sangat sulit sekali membedakan mana produk makanan dalam kemasan yang benar-benar halal sesuai dengan syariat islam untuk dikonsumsi dan mana produk makanan dalam kemasan yang hanya labelnya saja yang halal tetapi bahan baku dan isinya tidak halal. Padahal di dalam UU No. 7 tahun 1996 sendiri dijelaskan tentang beberapa pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu Bab Label dan Iklan Pangan pasal 30 dan 34. Bunyi pasal dan penjelasan pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 30 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam dan atau di kemasan pangan.

Begitulah kondisi yang terjadi saat ini di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau ini. Jika LPPOM-MUI tidak serius menanggapi permasalahan yang terjadi di lapangan, maka tidak menutup kemungkinan produk makanan dalam kemasan yang dibeli dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah tercampur dengan makanan yang haram.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengaruh Labelisasi Halal terhadap keputusan masyarakat dalam membeli produk. Penelitian ini kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang di beri judul : **PENGARUH LABELISASI HALAL PADA USAHA ROTI TAWAR DI KEC. BAGAN SINEMBAH KAB. ROKAN HILIR DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

B. Batasan Masalah

Mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan dana yang tersedia, maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu hanya pada masalah Pengaruh Labelisasi Pada Usaha Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

⁹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

1. Bagaimana proses labelisasi kehalalan produk Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam ?
2. Bagaimana pengaruh labelisasi Halal produk Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian :
 - a. Untuk mengetahui proses labelisasi kehalalan produk Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi Halal produk Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam ?
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya tentang proses labelisasi kehalalan makanan yang dilakukan oleh LPPOM-MUI di Rokan Hilir.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau masukan bagi pihak terkait tentang pengaruh dari labelisasi halal pada makanan dalam kemasan terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk.

- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pengusaha Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

b. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah proses labelisasi Halal produk pada Usaha Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁰

¹⁰ M. Haryanto, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2002), hlm. 45.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 8 usaha Roti Tawar, sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 Usaha Roti.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua (2) sumber, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data pokok, yaitu sumber data yang diperoleh dari beberapa Usaha Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah berupa data pendukung, yaitu sumber data yang berasal dari buku-buku, majalah, koran, internet dan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Adalah sebuah dialog yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa pemilik usaha Roti Tawar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

¹¹ Iqbal, Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik*, (Jakarta : Bumi Akasara, 2002), hlm. 47.

b. Observasi

Adalah mengamati secara langsung kondisi beberapa usaha Roti Tawar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

c. Dokumentasi

Yaitu berupa formulir, brosur, gambar yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan Dalam menganalisis data-data yang ada adalah dengan *analisis kualitatif* yaitu data-data yang diperoleh dijabarkan dalam uraian yang tersusun secara sistematis, lalu dianalisis secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan permasalahan.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data-data, baik berupa data *Kualitatif* maupun *Kuantitatif*. Data *Kualitatif* yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Sedangkan data *Kuantitatif* dituangkan untuk menerangkan dan lebih menjelaskan data-data yang berupa angka-angka atau perbandingan dari beberapa gambaran sehingga akan diperoleh gambaran baru dan kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat

7. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Metode deduktif

Yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum, kemudian di analisis dan diuraikan secara khusus.

b. Metode induktif

Yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus, kemudian di analisis dan diuraikan secara umum.

c. Metode deduktif analisis

Yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh, kemudian di analisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya kedalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Penyajian dalam bab ini meliputi sejarah berdirinya BPOM Rokan Hilir, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini penulis mencoba menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas yang meliputi

pengertian labelisasi, pengertian halal, pengertian keputusan pembelian dan pandangan islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang rumusan proses labelisasi halal terhadap produk makanan dan pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk Roti Tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran penulis.

BAB II
GAMBARAN UMUM KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

A. Letak geografis dan demografis

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontroleur-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap dikota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

"Terwujudnya Rokan Hilir yang Maju dan Sejahtera dan Berdaya Saing 2016"

Maju, Sejahtera dan berdaya saing diukur melalui indikator :\

- a. Tingkat Kemakmuran Yang Tercermin Pada Tingkat Pendapatan
- b. Infrastruktur Yang Maju
- c. Tingginya Tingkat Pendidikan Penduduk
- d. Tingginya Derajat Kesehatan Masyarakat
- e. Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Kecil
- f. Angka Harapan Hidup Yang Lebih Tinggi
- g. Kualitas Pelayanan Sosial Yang Lebih Baik
- h. Adanya Peran Serta Rakyat Secara Nyata dan Efektif Dalam Segala Aspek Kehidupan, Baik Ekonomi, Sosial, Politik, Maupun Pertahanan Keamanan.

2. MISI

- a. Memperkuat Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengelola Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.
- b. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat, Memajukan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa.
- c. Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- d. Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal, Bersih dan Berwibawa.

- e. Memantapkan Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu Berlandaskan Iman dan Taqwa.

C. WILAYAH GEOGRAFIS

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 101°21 BT. Batas Kabupaten Rokanbb Hilir :

- a. Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- c. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara
- d. Sebelah Timur dengan Kota Dumai

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan palau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan Lainnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke Muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau

Sedangkan Kecamatan Bagan Sinembah adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Secara geografis, letak Kecamatan Bagan Sinembah berada pada titik koordinat 1°14–2°30 LU dan

100°6–101°21 BT. Kecamatan Bagan Sinembah memiliki luas wilayah ± 111.278,91 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Kubu
- b. Sebelah barat : Provinsi Sumatra Utara
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pujud
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Bangko Pusako

Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah terbagi atas 13 desa dimana Desa Bagan Sinembah Timur merupakan desa yang memiliki wilayah paling luas yaitu 9.000 Ha dan Desa Harapan Makmur Selatan yang mempunyai wilayah paling kecil yaitu 458 Ha. Pada tabel, dapat dilihat mengenai pembagian wilayah dari Kecamatan Bagan Sinembah.

D. Penduduk dan Perkembangannya

Kependudukan merupakan masalah yang kompleks sekali bahkan merupakan masalah nasional terutama menghadapi perkembangan penduduk yang terus meningkat bersamaan masalah yang dihadapinya. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin tingginya tuntutan akan kesempatan kerja atau lapangan kerja.

Gejala yang terdapat dalam masalah kependudukan adalah dinamika penduduk, perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk yang menyebabkan perubahan serta perkembangan jumlah penduduk Kecamatan Bagan Sinembah. Jumlah penduduk Kecamatan Bagan Sinembah saat ini adalah 132.651 jiwa yang terdiri dari 69.988 jiwa atau 52.76% laki-laki dan 62.663 jiwa atau 47.24% perempuan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MANAJEMEN PENGELOLAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. Pengertian Industry Rumah Tangga

Masyarakat industri merupakan suatu lingkungan atau kondisi yang perlu diciptakan dan dibangun agar landasan perubahan yang lebih kokoh dapat diwujudkan antara lain melakukan upaya-upaya proses pengembangan sumber daya manusia. Didalam era industrialisasi masyarakatnya digambarkan akan terdiri atas masyarakat yang produktif yang dilandasi oleh sikap mental dan motivasi yang kuat untuk maju berdisiplin, berdedikasi tinggi pada dirinya, keluarganya dan Negara.¹

Pembangunan industri diarahkan pada pengembangan industri kecil dan sedang yang sifatnya padat karya demi terciptanya kesempatan kerja serta terciptanya suatu landasan pembangunan sektor industri yang lebih luas bagi pertumbuhan selanjutnya. Di samping itu perlu diusahakan agar perkembangan industri besar dan menengah hendaknya dapat merangsang pertumbuhan industri kecil dan saling mengisi.

Industri kecil dalam formatnya bisa disertai dengan *home industry* atau *cottage industry* karena kegiatannya dilakukan secara bersahaja, dan pada umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional. Dengan kata lain pengelolaan organisasi atau manajemen yang diterapkannya masih sederhana, dilakukan dengan kekeluargaan. Sedangkan kegiatan tersebut terpusat di rumah

¹ Maryatno dan Y. Sri Susilo, *Tulisan dari masalah usaha kecil sampai masalah ekonomi makro* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), hal. 31

tangga atau dalam suatu wilayah di tempat kediamannya sendiri yang dilakukan secara musiman, pesanan terbatas (lokal) dan sebagian kecil secara kontinyu terjangkau pemasarannya dan sebagian kecil di ekspor.

Pengertian pada industri kecil memiliki arti yang berbeda dalam berbagai konteks dan lembaga yang menggunakannya, dan hal ini seringkali menimbulkan kekeliruan interpretasi bagi yang mencoba mengadopsi kebijakan atau pengalaman negara lain dalam pengembangan industri kecil.

Kriteria perusahaan di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang sebagai industri kerajinan dan rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5-19 orang sebagai industri kecil, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang sebagai industri sedang atau menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai industri besar.

Menurut SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 5 juni 1994 adalah “perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan nilai penjualan atau omzet setinggi-tingginya Rp 66 juta atau aset setinggi-tingginya Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan yang ditempati”. Apabila kita mengacu dari UU N0. 9 tahun 1995 yang digunakan oleh Departemen Koperasi menetapkan kriteria “usaha kecil sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar dan dimiliki oleh warga Indonesia” tentang usaha kecil. Lebih lanjut UU No. 9 tahun 1995 di dalamnya juga menjelaskan tentang pengertian industri kecil “ industri kecil adalah industri yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Hasil penjualan tahunan kurang lebih Rp 4 milyar. Usaha sendiri, bukan anak perusahaan dari bentuk usaha perseorangan. Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu seperti usaha rumah tangga, pedagang kecil, kaki lima, maupun asongan”.

Istilah pengusaha kecil diartikan sebagai suatu segmen pengusaha dengan usahanya dari kacamata permasalahan ekonomi domestik.² Melihat berbagai defenisi diatas pada penetapan jumlah pendapatan atau pada penjualan terdapat bermacam-macam perbedaan dalam memberikan defenisi oleh beberapa tokoh, namun dalam hal ini penulis memberikan kesimpulan hanya pada faktor jumlah tenaga kerja, karena melihat terdapat persamaan beberapa tokoh dalam mendefenisikan industri dalam jumlah tenaganya. Apabila disimpulkan yaitu industri kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dalam bentuk usaha perorangan dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

B. Jenis-jenis Industri

Untuk mengetahui macam-macam industri ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang.

1. Pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (DP). Menurut DP, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu:³
 - a. Industri dasar

² Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2002), hal. 206

³ Djojohadikusumo, Sumatri, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor , 2004), hal. 377

Industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dan kelompok kimia dasar. Yang termasuk dalam industri mesin dan logam dasar; industri mesin pertanian, elektronika kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya.

Sedangkan yang termasuk dalam kelompok kimia dasar antara lain; industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri batu bara, industri silikat, dan sebagainya. Ditinjau dari misinya industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonom, membantu penjualan struktur industri, dan bersifat padat modal. Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar sejajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya.

b. Industri kecil

Industri kecil yang meliputi antara lain industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik, dan lain-lain). Kelompok industri kecil ini mempunyai misi melaksanakan pemerataa. Teknologi yang digunakan menengah atau sederhana, dan padat karya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambah kesempatan

kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

c. Industri hilir

Industri hilir yaitu kelompok aneka industri yang meliputi antara lain industri yang mengelolah sumber daya hutan, industri yang mengelola hasil pertambangan, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. Kelompok aneka industri ini mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju.

2. Pengelompokkan industri menurut jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pengelompokkan industri dengan cara ini dibedakan menjadi 4 yaitu:

- a. Perusahaan/industri besar jika mempekerjakan 100 orang atau lebih
- b. Perusahaan/industri sedang jika mempekerjakan 20 sampai 99 orang
- c. Perusahaan/industri kecil jika mempekerjakan 5 sampai 19 orang
- d. Industri kerajinan Rumah Tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

Dari segi kesempatan kerja yang diciptakan, maka industri kerajinan rumah tangga adalah yang paling penting. Sedangkan dari segi nilai tambah yang dihasilkan maka perusahaan-perusahaan industri besar/sedang yang paling menonjol.

Keragaman sektor industri di Indonesia telah menghadapkan para perencana ekonomi Indonesia pada dilema. Bila tujuan yang diutamakan adalah penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan, maka sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus disalurkan pada usaha-usaha yang membantu sektor kerajinan rumah tangga yang tidak produktif dan tidak banyak diketahui ini. Bila tujuan yang diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi maka sumber-sumber tersebut haruslah diarahkan kepada usaha-usaha pengembangan perusahaan-perusahaan industri besar.

C. Ciri-ciri Industri Kecil

Ciri-ciri industri kecil menurut beberapa ahli sama dengan sektor informal. Ciri-ciri industri kecil adalah sebagai berikut: (1) pendidikan formal yang rendah, (2) modal usaha kecil, (3) miskin, (4) upah rendah dan (5) kegiatan dalam skala kecil.⁴

Dengan melihat ciri-ciri diatas merupakan bukti bahwa industri kecil memperoleh pembinaan-pembinaan demi meningkatkan produktivitas dan kualitas sehingga mampu bersaing dengan industri besar.

Berikut ini uraian tentang karakteristik industri kecil yang sering ditemui dalam masyarakat:

- a. Rendahnya pendidikan Rendahnya pendidikan pengusaha akan mempengaruhi pada kualitasnya, sebab sumber daya manusia dalam industri kecil memiliki dasar yang kuat maka sumber daya manusia sangat perlu dibenahi terlebih dahulu, baru kemudian membenahi

⁴ Martin Perry, Mengembangkan Usaha Kecil, (Jakarta: Murai Kencana PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 54

faktor yang lain misalnya modal dan lokasi usaha. Bahwa strategi suatu Negara sering tidak bisa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas.

b. Keterbatasan modal

Keterbatasan modal usaha merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh para pengusaha kecil. Masalah permodalan telah menjadi suatu dilemma yang berkepanjangan. Keterbatasan akses bagi industri kecil pada dasarnya dapatlah dikatakan sebagai iklim diskriminatif yang bersumber dari sektor swasta.

c. Lemahnya penggunaan teknologi

Penggunaan teknologi berkaitan erat dengan tinggi rendahnya tingkat produktivitas usaha. Karakteristik yang dimiliki oleh industri kecil dalam bidang teknologi pada umumnya masih sederhana dan tradisional. Sehingga akibatnya tingkat produktivitas oleh industri kecil rendah dan kualitasnya kurang dapat memenuhi selera pasar terutama pasar ekspor.

**D. Beberapa Sarana, Bantuan serta Bentuk Pembinaan Bagi Usaha Kecil
Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**

Sebagai sarana, bantuan serta bentuk nyata pembinaan usaha kecil yang tercatat selama ini diantaranya adalah⁵ :

⁵ Suara Pembaharuan, *Problematika Pengangguran*, (2005), hal. 4.

a. Sistem Kemitraan Usaha

Dalam bentuk ini dibangun usaha antara pengusaha besar dan kecil yang saling menguntungkan dengan berbagai pola. Beberapa bentuk atau pola kemitraan yang dijalankan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil ini diantaranya adalah; pemilikan saham, bapak angkat, sistem vendor (dagang umum), hubungan dagang biasa, usaha patungan, subkontaktor, waralaba (*franchise*), dan lain-lain.

b. Dana Pembinaan BUMN 1-5 Persen dari keuntungan bersih program ini didasari oleh SK Menteri Keuangan No. 316 / KMK. 016 / 1994 yang mengharuskan perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengisikan keuntungan bersih 1-5 persen untuk membantu pengusaha kecil dengan bunga rendah. Pada tahun 1994, misalnya telah tercatat 40 milyar dana keuntungan BUMN telah terserap oleh pengusaha kecil diseluruh Indonesia. Dana yang terserap sebetulnya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana yang telah disediakan oleh BUMN yaitu 268 milyar. Agar dana yang tersedia mudah terserap maka Departemen Koperasi telah melibatkan seluruh kantor wilayah dan Kantor Departemen, sehingga memudahkan pengusaha kecil untuk memperolehnya.

c. Pembentukan Lembaga Pejamin Kredit Usaha Kecil Lembaga penjamin kredit usaha kecil ini baru dibentuk bulan oktober 1995 dan merupakan kerjasama badan hukum PT antara KADIN dan Golkar.

Pada prosesnya, lembaga penjamin ini akan memberi jaminan kredit sebesar Rp 50- Rp 250 juta.

d. Fasilitas Kredit Perbankan Khususnya untuk Pengusaha Kecil

Berbagai jenis perkreditan untuk para pengusaha kecil pernah atau sedang diberlakukan oleh pemerintah melalui perbankan, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Diantara jenis kredit tersebut diantaranya adalah :

- 1) Kredit KUT dan Bisnis (Khusus Petani)
- 2) Kredit Canduk Kulak, (untuk petani, nelayan, dan usaha kecil lainnya)
- 3) Kredit Usaha Kecil (KUK). Kredit usaha kecil diberikan pada semua jenis usaha dengan plafon tertinggi Rp 250 juta. Kredit usaha kecil disalurkan oleh bank-bank pemerintah dan swasta. Sebelum deregulasi 29 Mei 1993. plafon kredit usaha kecil ditentukan Rp 200juta. Kredit usaha kecil yang telah berhasil disalurkan kepada para pengusaha kecil sampai bulan Juli 1995 adalah berjumlah Rp 37-50 Trilyun.

e. Kredit Tanpa Agunan (Kredit Kelayakan Usaha) Kredit kelayakan usaha pada dasarnya adalah salah satu bentuk penyederhanaan dari kredit usaha kecil (KUK). Beberapa ciri kredit kelayakan usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Batas maksimal kredit sebanyak Rp 50 juta

- 2) Diberikan tanpa *colateral* (agunan fisik), yang menjadi agunan hanyalah proyek yang dibiayai oleh pinjaman tersebut, atau hak tagih dari kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman tersebut, misalnya, jika seorang pengusaha mendapatkan order pembelian produknya, maka surat pesanan tersebut bias diagunkan kebank untuk memperoleh kredit sehingga pengusaha tersebut mendapat dana untuk membuat produk yang telah dipesan tersebut. Contoh lain, jika seorang kontraktor mendapat SPK (Surat Perintah Kerja), SPK tersebut dapat diagunakan ke bank untuk memperoleh dana tambahan.
- 3) Kredit kelayakan usaha hanya diwajibkan kepada bank-bank pemerintah. Meskipun demikian, sudah banyak bank-bank swasta yang ternyata telah ikut serta menjalankan program ini. Misalnya bank Bukopin telah lama menerapkan kredit pedesaan. Bank BII telah lama pula memberikan kredit tanpa agunan kepada para pemulung untuk mengembangkan usahanya, yang jumlahnya menmcapai Rp 601 milyar (29% dari total kreditnya) sampai Juli 1995.
- 4) Proses permohonan dan analisis kredit kelayakan usaha yang lebih sedernaha. Beberapa formulir permohonan data serta dokumen pendukung yang menjadi prasyarat telah dikurangi sehingga lebih menyederhanakan prosedur peminjaman. Selang waktu keputusan diterima/ ditolak juga maksimal hanya dua minggu. Pada tahun

1995 bank pemerintah menyediakan dana Rp 50 milyar untuk disalurkan kepada pengusaha kecil melalui program kredit kelayakan usaha ini. Jika setiap nasabah mendapatkan maksimal Rp 50 juta, maka terdapat sedikitnya 1000 usaha kecil yang mendapatkan kredit kelayakan usaha pada tahun 1995.

f. Pembentukan Proyek Pengembangan Usaha Kecil

Pembentukan proyek pengembangan usaha kecil terutama ditujukan untuk membantu bank dalam mencari nasabah / proyek yang dapat dibiayai dengan kredit usaha kecil. Peningkatan peranan pembentukan proyek pengembangan usaha kecil terhadap usaha kecil juga dilakukan dengan pendekatan kelembagaan usaha kecil dan kelompok koperasi.

g. Pembentukan proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat. Dengan bantuan kelompok swadaya masyarakat, perbankan menyalurkan dana ke pengusaha kecil di daerah. Tujuan proyek ini diantaranya adalah meningkatkan akses kelompok usaha masyarakat pedesaan pada pelayanan keuangan bank.

h. Pembentukan forum komunikasi perbankan untuk pengembangan usaha kecil. Forum ini dibentuk pada bulan Juni 1995 sebagai upaya untuk meningkatkan peran perbankan dalam pengembangan usaha kecil. Melalui ketentuan pemerintah dalam menyalurkan kredit usaha kecil bisa belajar dari bank lain sehingga ketentuan penyaluran kredit usaha kecil sebanyak 20% (dari total kredit yang disalurkan) bisa dipenuhi oleh masing-masing bank.

E. Manfaat Industri Kecil

Terlepas dari adanya berbagai perbedaan definisi, industri kecil tetap mempunyai kedudukan yang penting dalam perekonomian negara, selain dari segi ekonomi peran industri kecil juga berperan atau memberi manfaat dari segi sosial yang juga sangat berperan aktif dalam perekonomian.

Kontribusi industri kecil dalam perekonomian secara makro cukup berarti. Sumbangan tersebut terutama dari segi penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, mereka juga memberikan kontribusi dalam penciptakan nilai tambah dan devisa ekspor non migas meskipun nilainya relatif kecil.⁶

Kesimpulan tentang manfaat adanya industri kecil yaitu⁷ :

- a. Industri kecil dapat menciptakan peluang berusaha yang luasnya dengan pembiayaan yang relatif murah.
- b. Industri kecil turut mengambil peranan dalam peningkatan dan mobilisasi tabungan domestik
- c. Industri kecil mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang,

Usaha kecil dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang tepat dalam pembangunan di Negara yang sedang berkembang, karena:

- a. Usaha kecil mendorong munculnya kewirausahaan domestik dan sekaligus menghemat sumber daya negara

⁶ Maryatno dan Y. Sri Susilo, *op.cit.*, hal. 4

⁷ Harimurti Subanar, *manajemen usaha kecil*, (Yogyakarta: Fakultas ekonomi UGM, 2007), hal 5

- b. Usaha kecil menggunakan teknologi padat karya, sehingga dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan yang disediakan oleh perusahaan berskala besar
- c. Usaha kecil dapat didirikan, dioperasikan dan memberi hasil dengan cepat
- d. Pengembangan usaha kecil dapat mendorong proses desentralisasi inter-regional dan intra-regional, karena usaha kecil dapat berlokasi di kota-kota kecil dan pedesaan
- e. Usaha kecil memungkinkan tercapainya obyektif ekonomi dan sosial politik.

F. Kelebihan dan Kelemahan Usaha Kecil

Pemerintah melalui Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga kerja, serta pihak Perbankan telah melakukan upaya yang maksimal mungkin dalam membantu pengusaha kecil, industri kecil, maupun sektor informal. Melalui strategi pengembangan industri kecil, pada akhir pelita III telah mencapai jumlah unit usaha kecil yang tersebar di Pulau Jawa (74,54%) serta propinsi lainnya (23,46%)

1. Keunggulan Usaha Kecil

Pada kenyataannya, usaha kecil mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi, industri kecil di Indonesia mampu menambah nilai devisa bagi negara. Sedangkan sektor informal mampu berperan

sebagai *buffer* (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah. Secara umum perusahaan skala kecil baik perorangan maupun kerja sama memiliki keunggulan dan daya tarik seperti⁸:

- a. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri (merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance, dan administrasi).
- b. Perusahaan keluarga, dimana pengelolanya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.
- c. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru.
- d. Resiko usaha menjadi beban pemilik.
- e. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan prematur (*Premature High-Growth*).
- f. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang (*Corporate-Plan*).
- g. Independen dalam penentuan harga produksi atas barang atau jasa-jasanya.
- h. Prosedur hukumnya sederhana.
- i. Pajak relatif ringan, karena yang dikenakan pajak adalah pribadi/pengusaha, bukan perusahaannya.
- j. Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi.
- k. Mudah dalam proses pendiriannya.

⁸ Drs. Harimurti Subanar. Manajemen usaha kecil, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2006), hal. 6-10

- l. Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.
- m. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu
- n. Pemilik menerima seluruh laba.
- o. Umumnya mempunyai kecenderungan mampu untuk survive.
- p. Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola produk, jasa atau proyek perintisan, yang sama sekali baru atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing.
- q. Terbukanya peluang dengan adanya berbagai kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya usaha kecil di Indonesia

Disamping kelebihan secara umum seperti diatas, usaha kecil memiliki arti strategi secara khusus bagi suatu perekonomian, di antaranya:

- a. Dalam banyak pengerjaan produk tertentu, perusahaan besar banyak bergantung kepada perusahaan-perusahaan kecil, karena jika dikerjakan sendiri oleh mereka (perusahaan besar) maka *margin-nya* menjadi tidak ekonomis.
- b. Merupakan pemerataan konsentrasi dan kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat

2. Hambatan-hambatan Dalam Pengelolaan Usaha Kecil

Berbagai kendala yang menyebabkan kelemahan serta hambatan bagi pengelola suatu usaha kecil diantaranya masih menyangkut faktor intern dari usaha kecil itu sendiri serta beberapa faktor ekstern, seperti:⁹

⁹ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), hal. 29

- a. Umumnya pengelola *small-business* merasa tidak memerlukan ataupun tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar, analisa perputaran uang tunai/kas, serta berbagai penelitian ini yang diperlukan suatu aktivitas bisnis.
- b. Tidak memiliki perencanaan sistem jangka panjang, sistem akuntansi yang memadai, anggaran kebutuhan, modal, struktur organisasi dan pendegasian wewenang. Serta alat-alat kegiatan manajerial lainnya (perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian usaha) yang umumnya diperlukan oleh suatu perusahaan bisnis.
- c. Kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, lemah dalam promosi.
- d. Kurangnya petunjuk pelaksanaan teknis operasional kegiatan dan pengawasan mutu hasil kerja dan produk, serta sering tidak konsisten dengan ketentuan order/pesanan, yang mengakibatkan klaim atau produk yang ditolak.
- e. Terlalu banyak biaya-biaya yang di luar pengendalian serta utang yang tidak bermanfaat, juga tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan pembukuan standar.
- f. Pembagian kerja tidak proporsional, sering terjadi pengelola memiliki pekerjaan yang melimpah atau karyawan yang bekerja di luar batas jam kerja standar.
- g. Kesulitan modal kerja atau tidak mengetahui secara tepat beberapa kebutuhan modal kerja, sebagai akibat tidak adanya perencanaan kas.

- h. Persediaan yang terlalu banyak, khususnya jenis barang-barang yang salah (kurang laku).
- i. Risiko dan utang-utang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik.
- j. Perkembangan usaha tergantung pada pengusaha yang setiap waktu dapat berhalangan karena sakit atau meninggal.
- k. Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik.
- l. Perencanaan dan program pengendalian tidak ada atau belum pernah merumuskannya. Meskipun demikian, pemerintah tetap mendorong agar industri/usaha kecil mampu lebih berkembang dan mandiri dengan melaksanakan berbagai program pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak atau lembaga swadaya masyarakat, di antaranya:¹⁰
 - 1) Program peningkatan kemampuan usaha.
 - 2) Program pengembangan industri kecil untuk menunjang ekspor.
 - 3) Program pengembangan keterkaitan sistem bapak angkat dengan mitra usaha.
 - 4) Program pengembangan wiraswasta dan tenaga profesi.
 - 5) Program penelitian dan pengembangan industri kecil.
 - 6) Program menciptakan /pengaturan iklim dan kerja sama.
 - 7) Program pengembangan usaha kecil dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.

¹⁰ Ibid., hal. 10

- 8) Seminar dan pameran produk-produk industri kecil tingkat nasional maupun internasional.

G. Peran Usaha Kecil dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga yang disambungkan untuk memenuhi kebutuhan bersama ataupun perorangan dalam rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari satu macam sumber pendapatan, sumber pendapatan yang beragam tersebut dapat terjadi karena anggota rumah tangga yang bekerja melakukan lebih dari satu jenis kegiatan yang berbeda satu sama lain, faktor lain yang mempengaruhi terhadap keragaman sumber pendapatan adalah penguasa faktor produksi, pendapatan ini sendiri diperoleh sebagai hasil bekerja atau jasa dan asset-aset sumbangan dari pihak lain. Kumpulan dan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan tersebut merupakan total pendapatan rumah tangga.

Selain dari sektor sumber pendapatan rumah tangga petani mungkin pula berasal dari sektor pertanian. Pendapatan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama diperoleh rumah tangga dengan melakukan kegiatan usaha tani atau berburu tani, kegiatan diluar sektor pertanian dapat berupa kegiatan usaha berburu atau usaha sendiri. Kegiatan ini pada umumnya membutuhkan sejumlah modal dan keterampilan seperti dagang, jasa, dan usaha lain yang biasanya dilakukan apabila kegiatan pertanian sedang sepi ataupun mengisi waktu luang.

Upaya untuk meningkatkan wirausaha, khususnya pengembangan usaha kecil di Indonesia telah lama dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Berbagai kebijakan maupun bantuan telah dikeluarkan oleh pemerintah

untuk mendorong perkembangan usaha-usaha kecil ini. Keseriusan pemerintah untuk menangani usaha kecil ini terlihat dengan dibentuknya Menteri Koperasi dan Pengembangan Usaha kecil dalam Kabinet Pembangunan VI.¹¹ Bahkan saat ini pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pembinaan usaha menengah dan kecil, yang terdiri dari 8 bab 35 pasal.

Pihak swasta pun tidak mau ketinggalan. Mereka (khususnya pengusaha besar) telah beberapa kali melontarkan kesepakatan untuk ikut memberi andil dalam pengembangan usaha kecil. Pertama tahun 1980, yang diantaranya diwujudkan dalam Yayasan Prasetya Mulya, sehingga wadah untuk membantu kaum pengusaha kecil. Kemudian pada tahun 1984 yang menghasilkan deklarasi Hilton. Pada tahun 1991, puluhan pengusaha besar membuat komitmen untuk membentuk perusahaan modal ventura guna bersama-sama membangkitkan pengusaha menengah dan kecil. Terakhir, kesempatan yang mendapat sambutan pro dan kontra adalah bulan Agustus yang menghasilkan deklarasi Jimbaran/Bali. Pada deklarasi Jimbaran tersebut, diantaranya diambil kesepakatan bahwa 96 pengusaha besar di Indonesia akan menyisihkan 2% keuntungan yang mereka peroleh guna disalurkan pada kaum pengusaha kecil. Hal ini menunjukkan kepedulian para pengusaha besar terhadap pengembangan usaha kecil.

Peranan usaha kecil terhadap pembangunan ekonomi sebuah Negara memang tidaklah kecil. Di AS, Jerman, Jepang serta beberapa Negara maju lainnya, sejumlah usaha besar tumbuh melalui pembagian kerja dengan ribuan jenis usaha kecil, yang memproduksi bagian-bagian produksi yang dibutuhkan

¹¹ Purnomo, *Kebijakan Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Repelita VI*, (Yogyakarta: Kanwil Departemen Koperasi dan PPK Propinsi DIY, 2004), hal 5

oleh pengusaha besar tersebut. Peranan usaha-usaha kecil di Indonesia juga tidaklah kecil. Bagi Indonesia, secara politis usaha kecil berperan dalam pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat. Serta mampu menjadi katup pengaman bagi masalah pengangguran yang kian merebak. Dari data tercatat bahwa sejumlah usaha kecil pada saat ini kurang lebih 33,4 juta yang bergerak diberbagai sektor (Industri, perdagangan dan lain-lain). Dari sejumlah tersebut, sebanyak 15,635 juta merupakan pengusaha kecil mandiri. Sekitar 1,27 juta merupakan pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja dari anggota keluarga. Sebanyak 454. 000 merupakan pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap. Diperkirakan tenaga kerja yang terserap adalah sekitar 56% dari total tenaga kerja (suara pembaruan 28 september 1995). Tidak dapat dipungkiri bahwa problematika pengangguran yang selama ini telah menjadi isu Nasional sedikitnya telah terbantu dengan semakin berkembangnya unit-unit usaha kecil ini.

Industri kecil dan rumah tangga mempunyai peran yang besar terhadap pemerataan pendapatan tenaga kerja di Indonesia, yang secara otomatis mampu menyerap tenaga kerja.¹² Sebagai gambaran, berikut ini adalah tabel jumlah industri kecil, menengah, dan rumah tangga dari berbagai propinsi.¹³

Namun demikian, usaha kecil di Indonesia juga mengalami beberapa hambatan baik secara internal maupun eksternal. Beberapa hambatan tersebut diantaranya adalah¹⁴ :

¹² Koencoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogya: UGM Pres, 2005), hal 150

¹³ BPS, *Informasi Usaha Kecil di Indonesia Kerja sama Direktur Jenderal Pembina Usaha Kecil*, Departemen Koperasi dan PPK dengan BPS, (2003), hal 76.

¹⁴ Elisabeth Dianawati dan Prasetiantoka, *Pengembangan Industri Kecil sebagai langkah pemantapan struktur ekonomi menghadapi pasar bebas*, (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 80-81

- a. Lemahnya Manajemen. Para usaha umumnya tidak atau kurang mempunyai keahlian dibidang manajemen yang sangat dibutuhkan dalam mengelolah usaha. Sebagai contoh dalam mendirikan dan menjalankan usahanya, banyak para pengusaha tidak membuat perencanaan secara matang, namun lebih banyak menggunakan naluri dan kebiasaan, misalnya dengan catatan-catatan keuangan atau pembukuan, sehingga agak sulit memperoleh akses ke perbankan.
- b. Keterbatasan Kemampuan dalam Penetrasi pasar, baik didalam negeri maupun luar negeri. Mereka cenderung sangat pasif, karena kecilnya skala produksi dan keterbatasan dalam memperoleh informasi pasar.
- c. Kurangnya akses keteknologi modern Sebagian besar pengusaha kecil masih menggunakan teknologi konvensional dan tradisional. Akibatnya cukup banyak usaha atau industri kecil yang menghadapi kendala dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produknya, sehingga terbusur oleh pengusaha besar.
- d. Kurangnya akses ke bahan baku. Sering terjadi bahan baku sulit untuk mereka peroleh dan sangat tidak ekonomis jika dipesan dalam jumlah kecil.
- e. Kurangnya akses untuk memperoleh modal. Sebagian besar usaha kecil merasa segan apabila berhubungan dengan pihak bank (salah satu sumber dana mereka), karena mereka harus dihadapkan dengan birokrasi yang rumit banyaknya formulir yang harus diisi, lamanya realisasi pinjaman, dan sebagainya. Mereka yang bersedia pergi ke

bank juga sering mengalami kendala ditolak karena kurangnya data keuangan yang mereka miliki. Akibatnya mereka, lebih senang meminjam pada saudara atau rentenir.

Semua hambatan ini baik internal maupun eksternal, tentunya sangat mempengaruhi perkembangan usaha kecil di Indonesia. Tidak sedikit usaha kecil yang gulung tikar ditengah jalan, atau tetap mempertahankan usahanya tanpa mengalami perkembangan yang berarti.

3. Konsep Peningkatan Pendapatan

Dalam ilmu ekonomi ada beberapa konsep tentang pendapatan antara lain sebagai berikut:¹⁵

a. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product-GNP*)

Produk Nasional Bruto adalah jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu yang dihitung dalam bentuk uang dalam suatu Negara.

b. Produk Nasional Netto (*Net National Product-NNP*)

Produk Nasional Netto adalah produk Nasional Bruto (GNP) dikurang dengan penyusutan dan penggantian modal.

c. Pendapatan Nasional Netto (*Net National Income-NNI*)

Pendapatan Nasional Netto adalah jumlah nilai yang diterima oleh pemilik produksi sebagai balas jasa.

¹⁵ M. Tohar, , *Membuka Usaha Kecil*,(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hal. 16-18

d. Pendapatan Perseorangan (Perseorangan *Income*-PPI)

Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat.

- e. Transportasi, misalnya travel, taxi, angkutan laut, dan angkutan udara.
- f. Telekomunikasi, misalnya jasa telpon.
- g. Perdagangan, misalnya eksportir, importer, pedagang besar, dan pedagang eceran.
- h. Jasa-jasa, misalnya konsultasi hukum, perbengkelan, dan restoran
- i. Jasa konstruksi, misalnya kelistrikan, jembatan, dan kontraktor bangunan.²⁶

Pendapatan sebagai sejumlah uang yang telah diterima pada pelanggan dari perusahaan sebagai hasil penjualan barang dan jasa. Untuk memudahkan dalam mengartikan, maka pendapatan dibagi dalam beberapa bagian:

- a. Pendapatan berupa uang, yaitu segala penghasilan berupa uang yang biasanya diterima sebagai balasan jasa atau kontra prestasi. Sumber-sumber yang utama adalah gaji atau upah serta lain-lain balas jasa yang berupa, pendapatan dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas.
- b. Pendapatan berupa barang, yaitu segala penghasilan, yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diserahkan terimakan dalam bentuk barang dan jasa. Barang yang diperoleh dinilai dengan harga sekali pun tidak diimbangi atau disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang secara percuma-cuma, pembelian barang dan harga yang disubsidi oleh majikan.

- c. Lain-lain penerimaan barang, merupakan barang yang dipakai sebagai pedoman adalah segala penerimaan yang bersifat redistribusi dan biasanya membawa perubahan keuangan rumah tangga, misalnya penjualan barang-barang yang dipakai warisan. Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan pendapatan adalah jumlah penghasilan baik dari keluarga maupun perorangan dalam bentuk uang, yang diperolehnya dari jasa setiap bulan yang baik dari sebelumnya, atau dapat juga diartikan sebagai suatu hasil yang sedikit keberhasilan usaha, maka jumlah tersebut akan menjadi besar dan meningkat.

H. Perekonomian Rumah Tangga dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi kaum muslimin dalam segala urusan, dan As-sunnah merupakan penafsir, penjelas, serta memberi petunjuk atas Al-Qur'an. Al-Qur'an mencakup segala bidang kehidupan manusia yang saling berkaitan, di antaranya bidang perekonomian. Dalam perspektif Islam sistem perekonomian mengandung aturan-aturan syara' yang dapat mengatur kehidupan perekonomian suatu rumah tangga, masyarakat, dan umat Islam secara keseluruhan.

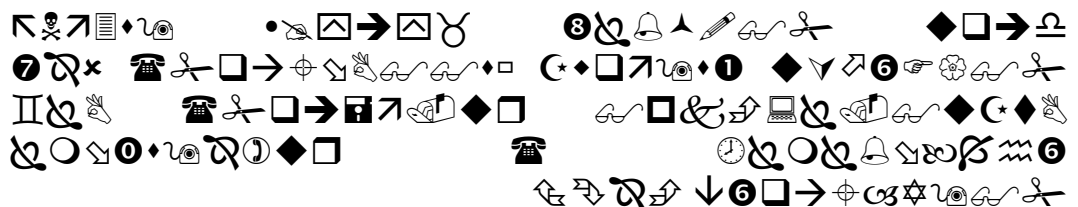
Suatu keharusan bagi seorang muslim untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam perspektif Islam agar dia dapat tetap menempuh jalan lurus yang didasarkan pada hidaya Allah. Ketentuan perekonomian Islam mencakup pengaturan tentang pendapatan, pengeluaran, penyimpanan, penabungan, dan pemilikan.

Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan perekonomian Islam adalah seperangkat aturan umum yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Ketentuan-ketentuan itu mengatur perekonomian rumah tangga muslim agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan umum hukum Islam, yaitu memelihara akal, agama, keturunan, kehormatan, dan harta di samping agar dapat mewujudkan pemenuhan kebutuhan spritual dan pemenuhan kebutuhan material.

Perekonomian Islam menyangkut masalah rumah tangga muslim yang bersifat *reabilitas* dan *fleksibilitas*, yaitu tetap dan tepat di dalam aturan-aturan umum, dan luwes didalam teknik dan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketentuan-ketentuan perekonomian Islam bagi rumah tangga muslim terdiri atas empat buah aturan pokok, yaitu:¹⁶

- a. Aturan-aturan dalam berusaha dan bekerja
- b. Aturan-aturan dalam pengeluaran
- c. Aturan-aturan penyimpanan dan menabung
- d. Aturan-aturan pemilikan.

Di dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, di antaranya Allah berfirman:



¹⁶ DR. Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal 61-68

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (Al-Mulk: 15).

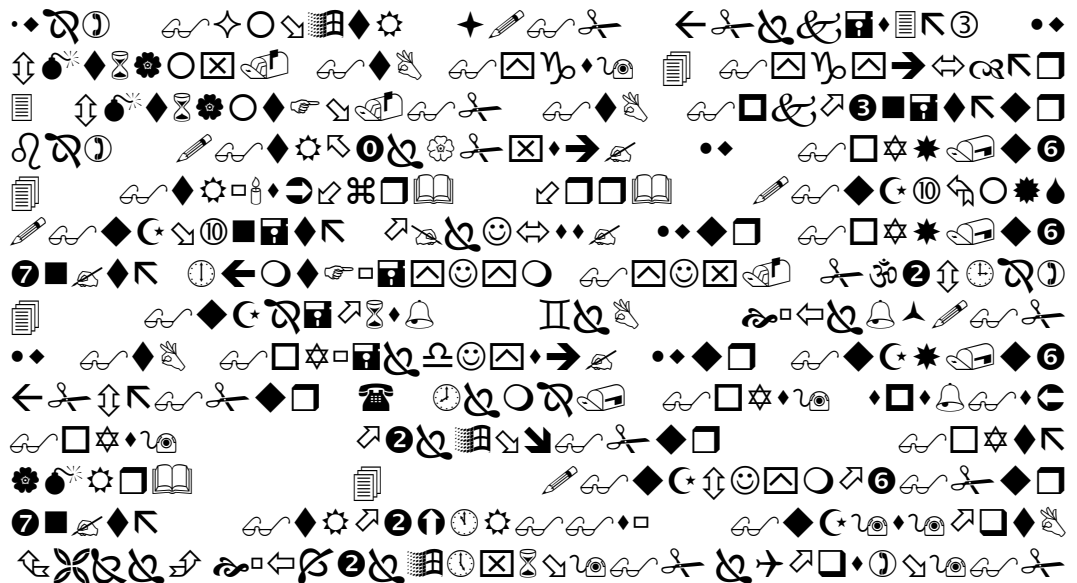
Syariat Islam memuat ajaran-ajaran yang mengatur manusia untuk bekerja dan mencari nafkah dengan jalan halal. Aturan-aturan yang berlaku bagi rumah tangga muslim di dalam bekerja dan berusaha adalah tanggung jawab laki-laki untuk bekerja dan wanita untuk mengatur rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Karena itulah, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:



Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (An-Nisaa' : 34)

Islam telah menjamin hak wanita untuk bekerja sesuai dengan tabiat nya dan aturan-aturan syariat dengan tujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan wanita. Meskipun demikian istri harus memiliki keyakinan bahwa yang utama dalam kehidupannya adalah mengatur urusan rumah tangga.

Bagaimanapun juga pekerjaan yang dibolehkan bagi wanita adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kerumah-tangga, yaitu yang dapat memenuhi hak-hak suami dan anak-anaknya. Dia harus berpegang kepada aturan-aturan syara' yang mengaturnya. Sungguh Allah telah menegaskan bahwa bekerja itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia, sebagaimana firman Allah berikut ini:



Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya". (Al-Baqarah: 286)

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah tidak membebankan pekerjaan kepada para hambanya kecuali yang sesuai dengan kemampuannya dan tuntutan kebutuhannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Responden

Identitas responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia dan pekerjaan.

1. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Perempuan	2	25,0
2	Laki-laki	6	75,0
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas dapat diketahui bahwa responden perempuan sebanyak 2 orang atau (25,0 %) sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang atau (75,0 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden berjenis kelamin laki-laki.

2. Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

Untuk mengetahui tingkat usia responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini :

Tabel IV.2 : Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	20 – 30	1	12,5
2	31 – 40	2	25,0
3	41 – 50	4	50,0
4	Di atas 50	1	12,5
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Bedasarkan Tabel IV.2 di atas dapat diketahui identitas responden menurut tingkat usia sebanyak 1 orang atau (12,5 %) responden berusia diantara 20 – 30 tahun, sebanyak 2 orang atau (25,0 %) responden berusia diantara 31 – 40 tahun, kemudian sebanyak 4 orang atau (50,0 %) responden berusia diantara 41 – 50 tahun dan sebanyak 1 orang atau (12,5 %) responden berusia di atas 50 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden berusia diantara 41 – 50 tahun.

3. Identitas Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Untuk mengetahui jenis pekerjaan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut ini :

Tabel IV.3 : Identitas Responden Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	2	25,0
2	Wiraswasta	3	37,5
3	Petani	1	12,5
4	Yang lain	2	25,0
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Bedasarkan Tabel IV.3 di atas diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 1 orang atau (25,0 %), kemudian responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 3 orang atau (37,5 %), selanjutnya responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 1 orang atau (12,5 %) dan responden yang bekerja lainnya sebanyak 2 orang atau (25,0 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden bekerja sebagai wiraswasta.

B. Pengelolaan Usaha Roti Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga

Pengelolaan usaha industry kecil (*home industry*) pada dasarnya dilakukan karena ada alasan tertentu seperti manajemen pengelolaan yang diberlakukan maupun karena faktor modal serta kepentingan lainnya. Begitu juga dengan pengelolaan beberapa usaha roti yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau. Kawasan yang cukup berkembang pesat ini karena berada di perbatasan Riau dengan Sumatera Utara ini menjadi kawasan yang mulai banyak dilirik oleh para investor mengingat kondisi kestrategisan dan kondisi ekonomi masyarakatnya.

Hingga saat ini ada banyak jenis usaha kecil skala *home industry* yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, mulai dari usaha pembuatan Tahu, Tempe, Roti hingga usaha kecil lainnya, namun penulis hanya memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini pada jenis Usaha Roti Tawar yang berada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini sudah ada sekitar 8 usaha.

Untuk melihat bagaimana pengelolaan Usaha Roti Tawar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis mencoba melakukan wawancara dan menyebarkan angket kepada 8 pengusaha roti tawar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk melihat hasil jawaban responden tentang Sudah berapa lama bapak/ibu menggeluti usaha pembuatan roti dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.4 Tanggapan responden tentang Sudah berapa lama bapak/ibu menggeluti usaha pembuatan roti

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	1 – 5 Tahun	5	62,5
2	5 – 10 Tahun	2	25,0
3	10 Tahun	1	12,0
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.4 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa Sudah berapa lama bapak/ibu menggeluti usaha pembuatan roti diketahui bahwa sebanyak 5 orang responden atau (62,5 %), sudah menggeluti usaha pembuatan roti selama 1 – 5 tahun, sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), sudah menggeluti usaha pembuatan roti selama 5 – 10 tahun dan sebanyak 1 orang responden atau (12,0 %), sudah menggeluti usaha pembuatan roti selama 10 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden baru memulai usahanya antara 1 – 5 tahun.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Sebelum menekuni bisnis ini, apa profesi yang bapak/ibu tekuni dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut ini :

Tabel IV.5 Tanggapan responden tentang Sebelum menekuni bisnis ini, apa profesi yang bapak/ibu tekuni

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Bertani	4	50,0
2	Beternak	2	25,0
3	Berkebun	2	25,0
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.5 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa Sebelum menekuni bisnis ini, apa profesi yang bapak/ibu tekuni diketahui bahwa sebanyak 4 orang responden atau (50,0 %), berprofesi sebagai petani, sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), berprofesi sebagai peternak dan sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), responden berprofesi sebagai pekebun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden berprofesi sebagai petani sebelum menggeluti usaha pembuatan roti.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Berapa jumlah karyawan bapak/ibu saat ini dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut ini :

Tabel IV.6 Tanggapan responden tentang Berapa jumlah karyawan bapak/ibu saat ini

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	1 – 3 orang	2	25,0
2	3 – 6 orang	4	50,0
3	lebih dari 6 orang	2	25,0
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.6 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa Berapa jumlah karyawan bapak/ibu saat ini diketahui bahwa sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), memiliki jumlah karyawan sebanyak 1 – 3 orang, kemudian sebanyak 4 orang responden atau (50,0 %), memiliki jumlah karyawan sebanyak 3 – 6 orang dan sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), memiliki jumlah karyawan lebih dari 6 orang, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki karyawan sebanyak 3 – 6 orang.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Apakah usaha bapak/ibu di bantu oleh keluarga dapat dilihat pada tabel IV.7 berikut ini :

Tabel IV.7 Tanggapan responden tentang Apakah usaha bapak/ibu di bantu oleh keluarga

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	6	75,0
2	Tidak	2	25,0
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.7 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa Apakah usaha bapak/ibu di bantu oleh keluarga diketahui bahwa sebanyak 6

orang responden atau (75,0 %), menyatakan bahwa usahanya dibantu oleh keluarga dan sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), menyatakan bahwa usahanya tidak dibantu oleh keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden dibantu oleh keluarga.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apa keterlibatan mereka dapat dilihat pada tabel IV.8 berikut ini :

Tabel IV.8 Tanggapan responden tentang apa keterlibatan mereka

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sebagai pengelola	2	25,0
2	Sebagai karyawan	4	50,0
3	Sebagai distributor	2	25,0
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.8 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa tentang apa keterlibatan keluarga diketahui bahwa sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), menyatakan bahwa keluarga Sebagai pengelola, kemudian sebanyak 4 orang responden atau (50,0 %), menyatakan bahwa menyatakan bahwa keluarga sebagai karyawan dan sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), menyatakan bahwa menyatakan bahwa keluarga sebagai distributor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata keluarga yang terlibat bekerja sebagai karyawan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah keterlibatan mereka mengganggu tugas dan fungsi mereka di dalam rumah tangga dapat dilihat pada tabel IV.9 berikut ini :

Tabel IV.9 Tanggapan responden tentang apakah keterlibatan mereka mengganggu tugas dan fungsi mereka di dalam rumah tangga

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Mengganggu	3	37,5
2	Tidak mengganggu	5	62,5
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.9 terlihat jawaban responden yang menyatakan apakah keterlibatan mereka mengganggu tugas dan fungsi mereka di dalam rumah tangga diketahui bahwa sebanyak 3 orang responden atau (37,0 %), menyatakan bahwa mengganggu dan sebanyak 5 orang responden atau (62,5 %), menyatakan bahwa aktivitas tersebut tidak mengganggu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata keterlibatan keluarga tidak mengganggu aktivitas mereka di dalam rumah tangga.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Sudah sejauh mana pemasaran Roti Tawar yang bapak/ibu hasilkan dapat dilihat pada tabel IV.10 berikut ini :

Tabel IV.10 Tanggapan responden tentang Sudah sejauh mana pemasaran Roti Tawar yang bapak/ibu hasilkan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Espor	0	0,00
2	Didalam Prov Riau	2	25,0
3	Di dalam Kab Rokan Hilir	6	75,0
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.10 terlihat jawaban responden yang menyatakan tentang Sudah sejauh mana pemasaran Roti Tawar yang bapak/ibu hasilkan diketahui bahwa sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), menyatakan bahwa usaha rotinya sudah di dalam Provinsi Riau, dan sebanyak 6 orang responden atau (75,0%), menyatakan bahwa usaha rotinya hanya di dalam Kab. Rokan Hilir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemasaran roti tawanya hanya di dalam Kab Rokan Hilir saja.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Apakah usaha ini memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga anda dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut ini :

Tabel IV.11 Tanggapan responden tentang Apakah usaha ini memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga anda

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	8	100
2	Tidak	0	0,00
3	Tidak tahu	0	0,00
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.11 terlihat jawaban responden yang menyatakan tentang Apakah usaha ini memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga anda diketahui bahwa sebanyak 8 orang responden atau (100,0 %), menyatakan bahwa usaha rotinya memberikan kontribusi besar bagi keluarganya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata usaha rotinya memberikan kontribusi besar bagi keluarganya.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Berapa kilo gram (Kg) tepung dan telur yang bapak butuhkan untuk satu bulan produksi dapat dilihat pada tabel IV.12 berikut ini :

Tabel IV.12 Tanggapan responden tentang Berapa kilo gram (Kg) tepung dan telur yang bapak butuhkan untuk satu bulan produksi

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	2.500 – 3.000 kg	2	25,0
2	3.000 – 3.500 kg	4	50,0
3	3.500 – 5.000 kg	2	25,0
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.12 terlihat jawaban responden yang menyatakan tentang Berapa kilo gram (Kg) tepung dan telur yang bapak butuhkan untuk satu bulan produksi diketahui bahwa sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), menyatakan bahwa usaha rotinya membutuhkan sebanyak 2.500 – 3.000 kg, kemudian sebanyak 4 orang responden atau (50,0 %), menyatakan bahwa usaha rotinya membutuhkan sebanyak 3.000 – 3.500 kg dan sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), menyatakan bahwa usaha rotinya membutuhkan sebanyak 3.500 – 4.000 kg. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata usaha rotinya membutuhkan sebanyak 2.500 – 3.000 kg bahan baku.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Berapa omset yang bapak/ibu hasilkan dalam satu bulan dapat dilihat pada tabel IV.13 berikut ini :

Tabel IV.13 Tanggapan responden tentang Berapa omset yang bapak/ibu hasilkan dalam satu bulan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	8 – 10 juta	5	62,5
2	10 – 15 juta	3	37,5
3	lebih dari 20 juta	1	12,5
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.13 terlihat jawaban responden yang menyatakan tentang Berapa omset yang bapak/ibu hasilkan dalam satu bulan diketahui bahwa sebanyak 5 orang responden atau (62,5 %), menyatakan bahwa omsetnya sampai 8 – 10 juta, kemudian sebanyak 3 orang responden atau (37,5 %), menyatakan bahwa omsetnya sampai 10 – 15 juta dan sebanyak 1 orang responden atau (12,5 %), menyatakan bahwa omsetnya lebih dari 20 juta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata omset usaha roti responden sebesar 8 – 10 juta perbulan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Apa kendala yang bapak/ibu hadapi dalam mengembangkan industry Roti Tawar dapat dilihat pada tabel IV.14 berikut ini :

Tabel IV.14 Tanggapan responden tentang Apa kendala yang bapak/ibu hadapi dalam mengembangkan industry Roti Tawar

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Bahan Baku	3	37,5
2	Biaya produksi	5	62,5
3	Distributor	1	12,5
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.14 terlihat jawaban responden yang menyatakan tentang Apa kendala yang bapak/ibu hadapi dalam mengembangkan industry Roti Tawar diketahui bahwa sebanyak 3 orang respoden atau (37,5 %), menyatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah mengenai bahan baku, kemudian sebanyak 5 orang respoden atau (62,5 %), menyatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah mengenai biaya produksi dan sebanyak 1 orang respoden atau (12,5 %), menyatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah mengenai distributor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata kendala yang dihadapi adalah mengenai biaya produksi.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Apakah bapak mendapatkan pinjaman kredit dari pemerintah untuk mengembangkan usaha ini dapat dilihat pada tabel IV.15 berikut ini :

Tabel IV.15 Tanggapan responden tentang Apakah bapak mendapatkan pinjaman kredit dari pemerintah untuk mengembangkan usaha ini

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	5	62,5
2	Tidak	3	37,5
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.15 terlihat jawaban responden yang menyatakan tentang Apakah bapak mendapatkan pinjaman kredit dari pemerintah untuk mengembangkan usaha ini diketahui bahwa sebanyak 5 orang respoden atau (62,5 %), menyatakan bahwa telah mendapatkan pinjaman kredit dari pemerintah dan sebanyak 3 orang respoden atau (37,5 %), menyatakan bahwa

menyatakan bahwa telah mendapatkan pinjaman kredit dari pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata menyatakan bahwa usahanya telah mendapatkan pinjaman kredit dari pemerintah.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Apakah bapak/ibu mendapatkan pelatihan dari pemerintah untuk mengembangkan industry Roti Tawar ini dapat dilihat pada tabel IV.16 berikut ini :

Tabel IV.16 Tanggapan responden tentang Apakah bapak/ibu mendapatkan pelatihan dari pemerintah untuk mengembangkan industry Roti Tawar ini

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	5	62,5
2	Tidak	3	37,5
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.15 terlihat jawaban responden yang menyatakan tentang apakah bapak/ibu mendapatkan pelatihan dari pemerintah untuk mengembangkan industry Roti Tawar ini diketahui bahwa sebanyak 5 orang responden atau (62,5 %), menyatakan bahwa telah mendapatkan pelatihan dari pemerintah dan sebanyak 3 orang responden atau (37,5 %), menyatakan bahwa menyatakan bahwa telah mendapatkan pelatihan dari pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata menyatakan bahwa usahanya telah mendapatkan pelatihan dari pemerintah.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Bagaimana kondisi ekonomi bapak/ibu saat ini jika dibandingkan dengan sebelum menekuni usaha Roti Tawar ini dapat dilihat pada tabel IV.17 berikut ini :

Tabel IV.17 Tanggapan responden tentang Apakah Bagaimana kondisi ekonomi bapak/ibu saat ini jika dibandingkan dengan sebelum menekuni usaha Roti Tawar ini

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Meningkat	6	75,0
2	Sama saja	2	25,0
3	Makin buruk	0	0,00
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.17 terlihat jawaban responden yang menyatakan tentang Bagaimana kondisi ekonomi bapak/ibu saat ini jika dibandingkan dengan sebelum menekuni usaha Roti Tawar ini diketahui bahwa sebanyak 6 orang responden atau (75,0 %), menyatakan bahwa ekonominya semakin meningkat dan sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), menyatakan bahwa ekonominya sama saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata ekonominya semakin meningkat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Apakah menurut bapak/ibu usaha ini akan berkembang dimasa yang akan datang dapat dilihat pada tabel IV.18 berikut ini :

Tabel IV.18 Tanggapan responden tentang Apakah menurut bapak/ibu usaha ini akan berkembang dimasa yang akan datang

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	6	75,0
2	Tidak	2	25,0
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel IV.18 terlihat jawaban responden yang menyatakan tentang Apakah menurut bapak/ibu usaha ini akan berkembang dimasa yang akan datang diketahui bahwa sebanyak 6 orang responden atau (75,0 %), menyatakan bahwa usahanya akan semakin berkembang dan sebanyak 2 orang responden atau (25,0 %), menyatakan bahwa usahanya tidak semakin berkembang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab bahwa usahanya akan semakin berkembang dimasa yang akan datang.

C. Faktor pendukung dan penghambat usaha roti dalam meningkatkan pendapatan keluarga

1. Faktor Pendukung

Pada kenyataannya, usaha kecil mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi, industri kecil di Indonesia mampu menambah nilai devisa bagi negara. Sedangkan sektor informal mampu berperan sebagai *buffer* (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah.

- a. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengelola usaha roti tawar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa :

“ Benar bahwa kalau usaha skala rumah tangga seperti usaha pembuatan roti tawar umumnya dikelola secara sederhana, sehingga pola manajemen dan gaya kepemimpinannya seta kegiatan marketing dan administrasinya juga dikelola secara sederhana dan kekeluargaan (Wawancara, Budi, 20 April 2013).

- b. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru.

Keberadaan usaha berskala kecil (*home industry*) di harapkan dapat memberi dampak positif terhadap lingkungan sekitar khususnya dapat membuka lapangan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh para pengelola usaha roti tawar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa :

“ Usaha yang kami bangun memang tidak begitu besar, namun dalam prakteknya usaha sederhana ini sedikit demi sedikit ternyata mampu menciptakan lapangan kerja baru, inovasi baru dan sumber daya baru serta jasa-jasa yang baru walaupun hanya dapat dinikmati oleh lingkungan keluarga (Wawancara, Tono, 20 April 2013).

- c. Resiko usaha menjadi beban pemilik

Selain dapat menciptakan lapangan kerja untuk lingkungan keluarga dan masyarakat disekitar lingkungan tersebut, ternyata jenis usaha kecil seperti ini juga memiliki keunggulan tersendiri dan keunggulan tersebut diantaranya adalah yang erat kaitannya dengan untung dan rugi. Sebagian besar resiko jenis usaha seperti ini pada umumnya menjadi beban pemilik karena usaha ini pada umumnya modal sendiri dan jarang yang memiliki owner. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh para pengelola usaha roti tawar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa :

“ Sebagian besar para pemilik usaha roti tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir hanya mengandalkan modal yang kecil, walaupun ada beberapa pengusaha roti yang mendapatkan

bantuan modal maupun kredit, sehingga kerugian dari usaha ini harus kami terima sendiri (Wawancara, Herman, 20 April 2013).

Dari hasil wawancara dengan beberapa pengusaha roti tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tentang faktor pendukung pengembangan usaha roti tawar dapat disimpulkan bahwa usaha keberadaan usaha rumah tangga tersebut selain diolah dengan pola manajemen sendiri, juga mampu menciptakan lingkungan kerja dan resiko usahanya juga ditanggung sendiri.

2. Kendala-kendala Yang dihadapi

Berbagai kendala yang menyebabkan kelemahan serta hambatan bagi pengelola suatu usaha kecil diantaranya masih menyangkut faktor intern dari usaha kecil itu sendiri serta beberapa faktor ekstern, seperti:

- a. Kesulitan modal kerja atau tidak mengetahui secara tepat beberapa kebutuhan modal kerja, sebagai akibat tidak adanya perencanaan kas. Usaha jenis ini pada umumnya minim modal, sehingga sangat dibutuhkan suntikan modal dari berbagai kalangan seperti perbankan maupun investor serta pemerintah terkait, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh para pengelola usaha roti tawar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa :

“Salah satu permasalahan yang terjadi dari sekian banyak masalah para pengusaha home industry adalah masalah kekurangan modal, sehingga kami tidak mampu mengembangkan usaha kami karena keterbatasan modal (Wawancara, Herman, 20 April 2013).

- b. Minimnya informasi bisnis maupun promosi. Minimnya informasi bisnis membuat usaha home industry seperti ini sulit untuk berkembang dan ekspansi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh para

pengelola usaha roti tawar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa :

“Minimnya informasi membuat usaha home industry yang hanya bermodalkan pas pasan sulit untuk melakukan promosi dan ekspansi. Itulah sebabnya kami sangat membutuhkan adanya pelatihan secara rutin agar usaha ini bisa lebih dikembangkan (Wawancara, Budi, 20 April 2013).

- c. Sulit untuk perkembangan. Usaha tergantung pada pengusaha yang setiap waktu sehingga sulit untuk berkembang apalagi jika terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti sakit atau meninggal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh para pengelola usaha roti tawar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa :

“Dampak dari permasalahan yang dialami oleh para pengusaha home industry yang sederhana menyebabkan usaha tersebut sulit berkembang (Wawancara, Budi, 20 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa kendala yang terjadi adalah karena kesulitan modal, minimnya informasi bisnis dan sulit untuk berkembang.

D. Analisa ekonomi islam terhadap pengelolaan usaha roti dalam meningkatkan pendapatan keluarga

Berdasarkan hasil pembagian angket kepada 8 responden serta wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa dampak dari usaha home insutry sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Hal ini bisa dilihat bahwa sebanyak 8 orang respoden atau (100,0 %), menyatakan bahwa usaha rotinya memberikan kontribusi besar bagi keluarganya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata usaha rotinya memberikan kontribusi besar bagi keluarganya.

Sedangkan secara syariah, usaha ini juga mampu menopang prekonomian masyarakat. Hal ini mengingat usaha jenis mampu dikelolah secara kekeluargaan sehingga manajemen pengelolaannya dapat dilakukan sesuai dengan kemauan keluarga tanpa harus diatur oleh pimpinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dari hasil wawancara dengan beberapa pengusaha roti tawar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tentang faktor pendukung pengembangan usaha roti tawar dapat disimpulkan bahwa usaha keberadaan usaha rumah tangga tersebut selain diolah dengan pola manajemen sendiri, juga mampu menciptakan lingkungan kerja dan resiko usahanya juga ditanggung sendiri.
- b. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa kendala yang terjadi adalah karena kesulitan modal, minimnya informasi bisnis dan sulit untuk berkembang.
- c. Berdasarkan hasil pembagian angket kepada 8 responden serta wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa dampak dari usaha home insutry sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Hal ini bisa dilihat bahwa sebanyak 8 orang responden atau (100,0 %), menyatakan bahwa usaha rotinya memberikan kontribusi besar bagi keluarganya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata usaha rotinya memberikan kontribusi besar bagi keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan pihak pemerintah berkenan untuk memberikan bantuan modal kepada para pengusaha home industry di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Diharapkan pihak UKM maupun pemerintah berkenan untuk memberikan informasi untuk pengembangan usaha home industry roti.
- c. Diharapkan pihak pemerintah berkenan untuk mengembangkan usaha home industry seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- BPS, *Informasi Usaha Kecil di Indonesia Kerja sama Direktur Jenderal Pembina Usaha Kecil*, Departemen Koperasi dan PPK dengan BPS, (2003).
- Djojohadikusumo, Sumatri, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor , 2004).
- DR. Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2008)
- Dr. Suharsimi Arikunto,, "*Prosedur penelitian dan suatu pendekatan*" Edisi Revisi III.(Rineka Cipta:Jakarta;2001).
- Drs. Harimurti Subanar. *Manajemen usaha kecil*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2006).
- Elisabeth Dianawati dan Prasetiantoka, *Pengembangan Industri Kecil sebagai langkah pematangan struktur ekonomi menghadapi pasar bebas*, (Jakarta: UI Press, 2005).
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2002).
- Harimurti Subanar, *manajemen usaha kecil*, (Yogyakarta: Fakultas ekonomi UGM, 2007).
- <http://www.komunitas-muslim-di-amerika>.
- Iqbal, Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik*, (Jakarta : Bumi Akasara, 2002).
- Koencoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogya: UGM Pres, 2005).
- M. Djakfar, *Proses Labelisasi Produk Halal*, (Jakarta : Kencana Media Grup, 2009).
- M. Haryanto, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2002).
- M. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Suska Pres, 2005).
- M. Tohar, , *Membuka Usaha Kecil*,(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000).
- M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*,(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004).
- M. Zaidin Abdal, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung : Angkasa, 2003).

Martin Perry, *Mengembangkan Usaha Kecil*, (Jakarta: Murai Kencana PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Maryatno dan Y. Sri Susilo, *Tulisan dari masalah usaha kecil sampai masalah ekonomi makro* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006).

Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : UNRI Pres, 2007).

Muhammad, Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta; PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 2006).

Purnomo, *Kebijakan Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Repelita VI*, (Yogyakarta: Kanwil Departemen Koperasi dan PPK Propinsi DIY, 2004).

Suara Pembaharuan, *Problematika Pengangguran*, (2005).

Yaqub, *Metode Penetapan Halal*, (Jakarta : Departemen Kesehatan, 2009).

Yunita, Anggraini, *Dampak Merek Asing Pada Persepsi dan Sikap Konsumen Terhadap Produk*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2002).